



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023

2023

PERDA NOMOR 2, LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 2 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023.

- ABSTRAK :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling Lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. Dasar hukum pembentukan peraturan ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Perda Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023, Perda Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2022, Perda Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023

Materi Pokok: Ruang lingkup Laporan Keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan dan Lampiran Ringkasan Laporan Pertanggungjawab APBD.

CATATAN : Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2024. – Jumlah Halaman : 8 lembar ditandatangani oleh Ismail Pakaya selaku Pj. Gubernur Gorontalo